

PENGELOLAAN SUMBERDAYA ARKEOLOGI SEBAGAI OBYEK WISATA YANG BERBASIS MASYARAKAT

I Gst. Ag. Ayu Mas Ratnawati

Abstract

The archaeological resources was found entire region of Indonesia as proud of ethnics, many of them used to develop knowlegde, religion, social, education, tourism etc.

Keyword : Management of archaeological resources.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Bumi Nusantara yang sarat dengan warisan budaya merupakan kekayaan yang bernilai tinggi bagi Bangsa Indonesia. Peninggalan-peninggalan yang dikandungnya yang merupakan sisa kehidupan jutaan tahun yang lalu sehingga tradisi masa sekarang telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari kawasan terpenting di dunia untuk pemahaman sejarah kemanusiaan dan peradaban. Bumi kita yang telah menyimpan sejarah kehidupan yang sangat tua telah menjadikannya sebagai lahan yang memberi kontribusi besar bagi sejarah dunia.

Kekayaan dan kekunaan yang ada di bumi Nusantara ini juga banyak ditemukan. Dan banyak mencirikan jejak-jejak kehidupan jaman prasejarah hingga berlanjut ke tradisi masa sekarang. Semuanya itu mencerminkan sejarah budaya manusia yang saling berinteraksi secara dinamis dan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya-budaya lain sehingga memperkaya kanzanah budaya bangsa.

Balai Arkeologi sebagai salah satu instansi yang bergerak di bidang penelitian arkeologi, akhir-akhir ini mengalami suatu peradaban seiring dengan perkembangan pemikiran masyarakat tentang ilmu arkeologi. Hal yang nyata

dari perubahan tersebut adalah adanya kegiatan yang bersifat pengembangan yang mulai diprogramkan oleh instansi-instansi yang bersangkutan. Akhir-akhir ini dirasakan sangat perlu dan dapat dikatakan wajib untuk memprogramkan kegiatan pengembangan seperti analisis, sosialisasi, pameran, penyuluhan, penyebaran hasil-hasil penelitian dari kegiatan lainnya. Kegiatan yang bersifat pengembangan tersebut bermuara pada satu hal yaitu masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sangat penting karena segala kegiatan penelitian dan pengembangan bertujuan untuk masyarakat. Kita dituntut untuk melibatkan masyarakat dalam proses penelitian dan dalam kegiatan pengembangan arkeologi, masyarakat merupakan tujuan utama. Masyarakat merupakan obyek yang harus dipuaskan melalui informasi yang diperoleh melalui penelitian.

Pola dasarnya pemanfaatan sumberdaya arkeologi itu mencakup dua aspek, yaitu aspek yang mencakup perlindungan benda-benda warisan budaya dari kerusakan dan kehancuran, adapun aspek kedua adalah segala cara dan sistem untuk mendapatkan sumberdaya arkeologi agar dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam meningkatkan pendapatan daerah. Tampaknya perlu dikatakan, bahwa sumberdaya arkeologi dapat dimanfaatkan sebagai pendorong bagi masyarakat setempat, untuk mengekspresikan segala daya cipta dan karyanya dewasa ini. Tinggalan arkeologi masa lalu yang sangat langka, serta sebagai peradaban dan budaya yang tinggi diharapkan dapat menarik para wisatawan (Kusumawati, 1991 : 6).

Tinggalan warisan budaya arkeologi seperti : Pura Gua Gajah, Pura Penataran Sasih, Candi Gunung Kawi, Pura Tirta Empul, Pura Taman Ayun, Pura Tanah Lot, Alas Kedaton, Pura Keihen dan lain sebagainya.

UU.RI No. 22 Tahun 1999 langkah yang mutlak ini harus dilakukan agar usaha yang bersifat negatif terhadap tinggalan arkeologi bisa diminimalisasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Edi Sedyawati tentang pengelolaan benda-benda cagar budaya dan dua langkah yang harus ditempuh yaitu kelembagaan dan sumberdaya manusia (Sedyawati, 1998 : 1-4). Kelembagaan yang dimaksud adalah instansi yang mengelola sumberdaya arkeologi dan sebagainya.

1.2 Metode Penelitian

Penelitian melalui tahapan beberapa aspek di beberapa situs. Pada tahapan pertama penelitian awal dilakukan dengan pengumpulan data yaitu :

- a. Studi kepustakaan : yaitu mencari laporan-laporan yang telah dipublikasikan maupun karya-larya tulis ilmiah dalam berbagai pertemuan ilmiah, merupakan teori-teori penunjang penelitian.

- b. Observasi : yaitu melakukan pengamatan di situs-situs/lokasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.
- c. Wawancara : yaitu untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan aspek terutama tentang keterlibatan masyarakat terhadap situs arkeologi. Wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang situs-situs arkeologi.

II. Sumberdaya Arkeologi

Sumberdaya arkeologi adalah keseluruhan hasil aktivitas manusia masa lampau yang biasanya berupa fragmen dan ada juga yang masih utuh dan insitu. Di antara sisa aktivitas manusia di masa lampau itu ada yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang, dan ada pula yang dilindungi oleh Undang-Undang, yang lazim disebut benda cagar budaya.

Sesuai dengan UU.RI. No. 5 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah :

- a. Benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagian atau sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya khas dan mewakili masa gayanya sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai-nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- b. Benda alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sedangkan yang dimaksud dengan situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda-benda cagar budaya, termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamat.

Tinggalan arkeologi atau yang lazim disebut benda cagar budaya (**BCB**) mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jatidiri bangsa, oleh karena itu pemerintah berkewajiban melindungi tinggalan arkeologi atau benda cagar budaya tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya hukum ini harus digalakkan untuk menghindari adanya upaya-upaya untuk memperlakukan tinggalan arkeologi tidak semestinya. Tindakan yang bersifat negatif terhadap sumberdaya arkeologi seperti pencurian, pengrusakan dan penjualan tentunya akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Bagi si pelaku tindakan ini tentunya akan menguntungkan dirinya, walaupun sifatnya hanya sesaat. Mereka tidak menyadari akibat dari perbuatannya akan menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara. Untuk menghindari hal seperti ini, benda cagar budaya perlu dikuasai oleh negara.

Benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil ciptaan bangsa yang bersangkutan di masa lampau sekaligus dapat dijadikan sumber kebanggaan dari bangsa yang bersangkutan. Oleh karenanya pelestarian benda cagar budaya merupakan suatu keharusan sehingga kebanggaan sebagai suatu bangsa dan kesadaran akan jatidiri akan semakin kokoh.

III. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan pariwisata budaya di Bali telah memberikan suatu dampak baik atau positif maupun negatif terhadap tinggalan arkeologi. Dampak positif terhadap tinggalan arkeologi dapat dilihat dari meningkatnya kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap tinggalan arkeologi. Kepedulian pemerintah terlihat dalam perbaikan tinggalan arkeologi yang tersebar di seluruh Bali yang dilaksanakan oleh Kantor Balai Pelestarian Peninggalan dan Purbakala Bali, NTB, NTT. Seperti misalnya pemugaran Candi Gunung Kawi (Tampaksiring), Taman Ujung (Karangasem), Taman Ayun (Mengwi), Pura Uluwatu (Badung), Tanah Lot (Tabanan), Kerta Gosa (Klungkung), Museum Manusia Purba (Jembrana), dan lain-lain. Kepedulian masyarakat adanya peningkatan pengawasan terhadap kesucian dan kelestarian terhadap tinggalan arkeologi, baik yang dijadikan obyek-obyek wisata maupun yang belum.

Dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi peranserta masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* harus lebih ditingkatkan. Masyarakat sebagai pewaris dan sekaligus pemilik tinggalan arkeologi harus dilibatkan dalam pengolahan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini tampak kurang dilakukan oleh pemerintah selama ini, dan pengelolaan lingkungan arkeologi. Masyarakat sering tidak mendapat informasi atau manfaat langsung dari tinggalan arkeologi yang mereka miliki. Akibatnya masyarakat tidak jarang apatis dan merasa tidak memiliki tinggalan arkeologi tersebut, sehingga kelestarian tidak dapat terjamin. Untuk menghindari hal tersebut, maka langkah-langkah antisipasi sebagai berikut : selalu mengikutsertakan masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan. Kebijakan pemerintah yang mendapatkan berbagai pembangunan pada kepentingan masyarakat atau memperdayakan masyarakat, senantiasa akan menuntut pula kemampuan agar memiliki pengetahuan yang dapat meningkatkan pola pikir dan pola tindakan dalam menghadapi gejala melonjaknya wisatawan. Untuk ini, maka masyarakat turut tidak sebagai pewaris yang tidak dapat berbuat banyak terhadap apa yang diwariskan nenek moyang mereka, tetapi

mereka harus difasilitasi, agar dapat memanfaatkan berbagai warisan sumberdaya arkeologi untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Secara bertahap perlu usaha dan langkah-langkah serta meningkatkan pengetahuan tentang warisan budaya, agar masyarakatnya mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai tentang berbagai obyek wisata budaya, diharapkan akan muncul kader-kader daerah yang dapat bertindak sebagai juru pemeran atau pemandu wisata yang handal tentang berbagai obyek wisata alam tersebut. Dengan demikian daerah akan memperoleh keleluasaan lapangan kerja bagi penduduk atau masyarakat.

Untuk mencapai tujuan kegiatan-kegiatan budaya yang dilakukan Pemda. Dan instansi terkait lainnya seupayanya melibatkan tokoh-tokoh adat atau mungkin anggota lembaga adat, agar pemahaman dan kepeduliannya terhadap tinggalan arkeologi menjadi lebih baik. Kegiatan seminar, sarasehan, ceramah, pameran mengenai sumberdaya arkeologi sangat tepat dilakukan pada saat adanya kegiatan tersebut. Misalnya pada hari Kemerdekaan Negara Kesatuan RI. Dan pada saat pesta Kesenian Rakyat Bali serta even-even lainnya. Usaha untuk melibatkan masyarakat dalam mengelola sumberdaya termasuk pemanfaatannya digelarkan terus, sehingga pemahamannya terhadap sumberdaya terus meningkat dan rasa memiliki akan semakin mendalam. Kondisi tentang akan memperkecil ruang gerak dari upaya negatif terhadap tinggalan arkeologi, akhirnya kelestarian dapat dijaga. Rasa optimisme tentang didasarkan atas kenyataan, bahwa potensi lembaga adat di Bali juga digerakkan untuk menjaga kelestarian sumberdaya dapat dilakukan. Lebih-lebih Pemerintah Daerah Tingkat I dan II mau menyisihkan sebagian kecil pendapatannya dan distribusi obyek-obyek wisata purbakala, dan disumbangkan kepada desa adat pemilik obyek wisata purbakala tersebut. Niscaya harapan ini bukanlah suatu yang mengada-ada, contoh konkrit mengenai hal ini ialah, menyerahkan 60% pendapatan dari obyek wisata Alas Kedaton, Desa Kukuh, Kabupaten Tabanan, kepada Desa Adat, sedangkan 40% diserahkan ke Pemkab. Tabanan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk menata obyek wisata, juga dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan upacara keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rangsangan ini tentunya memberi rangsangan yang cukup kepada masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap tinggalan arkeologi yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan langkah Pemerintah Daerah Tabanan ditiru oleh pemerintah daerah lainnya dengan menyisihkan sebagian kecil pendapatannya dari obyek wisata purbakala yang kemudian disumbangkan kepada desa adat yang memiliki tinggalan arkeologi yang dijadikan obyek wisata. Upaya pemerintah bersinergi dengan anggota lembaga adat dan

masyarakat umum lainnya diharapkan dapat mencapai sasaran seperti yang digariskan oleh Asisten Deputi di bidang keurbakalaan yang pada intinya terdiri dari :

- a. Melestarikan warisan budaya melalui upaya perlindungan pengembangan dan pemanfaatan.
- b. Menumbuh sadarkan masyarakat untuk membangkitkan kebanggaan terhadap budaya sendiri, cinta tanah air, serta memperkuat jatidiri bangsa.
- c. Meningkatkan penelitian, pengembangan arkeologi dan sejarah.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, dan organisasi profesi dalam pelestarian warisan budaya.
- e. Meningkatkan pengamanan, penataan dan penyajian (museum) sebagai upaya pelestarian warisan budaya bangsa.
- f. Melestarikan dan memanfaatkan warisan budaya bangsa untuk kepentingan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, persatuan, dan persahabatan antarbangsa.
- g. Mewujudkan kerjasama nasional, regional, dan internasional.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dikatakan, bahwa manusia yang berbudaya adalah manusia yang mampu menggunakan akal dan pikirannya untuk menciptakan gagasan atau ide yang nantinya dapat digunakan untuk menggali dan mengembangkan potensi budaya atau mengelola sumberdaya alam, sehingga dapat menjadi daya tarik para wisatawan.

Obyek wisata ini perlu mendapatkan perhatian yang baik, mengingat memiliki beraneka ragam budaya yang berbeda-beda. Dengan ragam budaya yang berbeda tersebut, maka setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, sehingga manusia memanfaatkan daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata. Salah satu penyebab ditetapkannya daerah tersebut memiliki atraksi budaya yang menarik. Dengan keadaan ini didasari bahwa juru wisatawan yang mengadakan perjalanan wisatawan ingin melihat sesuatu yang langka, kepribadian asli, indah dan mempesona, sehingga dapat memenuhi hasrat, ingin tahu dan menikmati budaya daerah lain tidak dapat disangkal, bahwa pendukung utama adalah kebudayaan. Secara konseptual pariwisata budaya bertumpu pada potensi budaya yang dimiliki konsep tersebut, karena budaya adalah sumber yang sangat potensial bagi kehidupan masyarakat dan telah mengakar serta meluas di tengah-tengah masyarakat. Dalam konsep itu budaya sebagai modal dasar mempunyai pengertian dan fungsi yang normatif dan operasional.

Sebagai konsep normatif aturan budaya diharapkan dapat mempunyai potensi dalam memberi identitas, arahan yang prinsipil dan memiliki pola kontrol. Dengan demikian potensi budaya dapat memberikan sumber motivasi bagi umat manusia dan masyarakat. Secara operasional budaya juga diharapkan dapat menjadi daya tarik utama untuk memperbesar kedatangan wisatawan. Melalui konsep pariwisata budaya tersebut kita mengharapkan bahwa antara budaya dan ekonomi, pariwisata dapat saling mengisi dan menikmati keuntungan sosial budaya. Dalam membuat program pengembangan pariwisata maupun meningkatkan kesinambungan karakter dan budaya. Dengan demikian berangsur-angsur pariwisata budaya menjadi fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat di daerah ini dapat memberikan arti semakin penting dalam meningkatkan harkatnya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan : pengembangan pariwisata di Bali telah menimbulkan dampak yang positif dan negatif terhadap tinggalan arkeologi. Dampak positif, yaitu ada peningkatan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap tinggalan arkeologi yang diwujudkan dalam pemugaran. Dampak negatif, yaitu pencemaran lingkungan dan penjualan benda-benda purbakala. Dengan demikian perlu usaha langkah peningkatan dan pengetahuan tentang warisan budaya, agar masyarakat nantinya akan mengetahui apa yang tidak boleh dan apa yang harus dilakukan dengan berbekal pengetahuan yang memadai. Lembaga adat harus dilibatkan, terutama menyangkut tentang keamanan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat tanpa melupakan aspek-aspek lainnya.

Sistem pengelolaan obyek wisata harus masyarakat atau lembaga adat dilibatkan, apalagi lembaga adat mendapat inkam dari obyek tersebut. Rangsangan ini tentunya memberi rangsangan yang cukup kepada masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap tinggalan arkeologi. Mudah-mudahan daerah-daerah lain mengikuti jejak Desa Adat Kukuh untuk mensejahterakan masyarakat dan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, A.A. Gede, 2002. Dampak Pariwisata Terhadap Tinggalan Arkeologi Bali, *Forum Arkeologi*, Balai Arkeologi Denpasar.
- Geria, I Wayan, 1993. *Interaksi Desa Adat dan Kepariwisataaan Studi Khusus di Desa Adat Sangeh, Kabupaten Badung*, Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Haris Sukendar, Ayu Kusumawati, 2005. *Pengembangan Sumberdaya Arkeologi Budaya dan Pariwisata Dompur*, diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompur, NTB.
- Kusumawati, Ayu, 1995. *Tinggalan Arkeologi Sebagai Sumberdaya Bangsa*. Wana Media Alumni Udayana No. 19 Tahun XI Juli ISSN
- Pitana, I Gede, 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Denpasar Bali Post.
- Sunarya, I Nyoman, 2005. Pemanfaatan Sumberdaya Arkeologi Pemberdayaan Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi *IAAI Komda Bali*, Balai Arkeologi Denpasar.